SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 113 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RENJA PD

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
   c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
   d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan

d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.

(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
   c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 113

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001



PERATURAN BUPATI BANDUNG

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORM E.70

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

No	Dokumen Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Tidak Kesesuain	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2	Pengolahan Data dan Informasi	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	✓			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan renstra perangkat daerah	✓			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD	✓			
7	Perumusan tujuan, susunan, indikator dan target kinerja	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat		✓	Tidak melaksanakan musrenbang	
9	Perumusan kegiatan prioritas	✓			
10	Pelaksanaan Forum perangkat daerah kabupaten	✓			
10a	Menyelaras program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan		✓	Tidak melaksanakan musrenbang	
10b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	✓			
10c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	✓			
10d	Menyesuaikan pendanaan peogeam dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuain SE Kepala Daerah	✓			
11	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	✓			

12	Program dan kegiatan antara perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas	✓			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang telah disahkan	✓			

Soreang, 08 Juli 2024

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ERWAN KUSUMA HERMAWAN, S.Sos., M.Si
19720801 199703 1 004
PEMBINA UTAMA MUDA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
E-mail: bkad@bandungkab.go.id Website: www.bkad.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 800/KEP.46-SEKRET/2024
Lampiran : 2 (Dua)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) menyatakan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah ;

b. bahwa untuk menyusun rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan implementasi dari rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah dibutuhkan suatu Tim ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, sebagaimana Lampiran I Keputusan ini ;

KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 19 Juli 2024

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ERWAN KUSUMA HERMAWAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 800 / KEP 46 - SEKRET / 2024
TANGGAL : 19 Juli 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

TIM PENYUSUN PENETAPAN RENCANA KERJA BKAD TAHUN 2023

Pengarah	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penanggung Jawab	:	Sekretaris BKAD
Ketua	:	Ratna Wulansari, SE.,MM (Perencana Ahli Muda)
Sekretaris	:	Hj. Sri Mulyani Hanipah A.Md (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat)
Anggota	:	1. Kepala Bidang Anggaran 2. Kasubid Penyusunan Anggaran I 3. Kasubid Penyusunan Anggaran II 4. Pipin Aripin, SE (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Anggaran) 5. Kepala Bidang Perbendaharaan 6. Kasubid Administrasi Perbendaharaan 7. Kasubid Kas Daerah 8. Erna Suciati Agustiani, S.Sos (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perbendaharaan) 9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 10. Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I 11. Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II 12. Evy Rachmawaty, SE.,MM (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi) 13. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 14. Kasubid Penilaian dan Penghapusan 15. Kasubid Inventarisasi dan Pelaporan 16. Kristin Martiana, SH (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pengelolaan BMD) 17. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kesekretariatan	:	1.	Agus Ricky Permana S.Sos (JFU pada Perencana)
		2.	Suhita Hera Margana S.Sos (JFU pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ERWAN KUSUMA HERMAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR : 800 / KEP 46 - SEKRET / 2024

TANGGAL : 19 Juli 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

TUGAS POKOK TIM PENYUSUN PENETAPAN RENCANA KERJA BKAD

I. PENGARAH

Memberikan arahan kepada tim dalam melaksanakan penyusunan Penetapan RENJA

II. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Penyusunan Penetapan RENJA.

III. KETUA

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Penetapan RENJA.
2. Mengendalikan seluruh kegiatan penyusunan Penetapan RENJA.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BKAD.

IV. SEKRETARIS

1. Membantu ketua mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Penetapan RENJA.
2. Membantu ketua mengendalikan seluruh kegiatan penyusunan Penetapan RENJA.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Penetapan RENJA kepada ketua.

V. ANGGOTA

1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam penyusunan Penetapan RENJA.
2. Memberikan arahan teknis dalam penanganan dan pengendalian dalam penyusunan Penetapan RENJA.
3. Mengkaji data-data yang terkumpul sebagai bahan penyusunan Penetapan RENJA.

VI. KESEKRETARIATAN

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan pelaksanaan tugas.
2. Memberikan pelayanan teknis administrasi.
3. Menyelenggarakan rapat-rapat pelaksanaan kebijakan berdasarkan petunjuk Sekretaris.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ERWAN KUSUMA HERMAWAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja merupakan dokumen yang memuat kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Dengan disusunnya Renja ini maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di usulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Semoga dokumen Renja Tahun Anggaran 2025 ini bermanfaat dan menjadi acuan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.

SOREANG, 29 JULI 2024

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ERWAN KUSUMA HERMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19720801 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH **7**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 23

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 25

2.5 Penelaahan Usulan Program 43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **53**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 53

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 56

3.3 Program dan Kegiatan..... 78

BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **94**

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 94

BAB V PENUTUP **104**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 Kabupaten Bandung 8

Tabel 2. 2 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah 20

Tabel 2. 3 Isu Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 23

Tabel 2. 4 T-C.31.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung 25

Tabel 2. 5 T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung 43

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran BKAD 57

Tabel 3. 2 T-C 32. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung 79

Tabel 4. 1 Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan 95

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanl serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja BKAD Tahun 2025 merupakan Dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntable di bidang keuangan daerah.

Namun demikian, Renja BKAD Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BKAD Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumya serta perumusan, permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dalam penyusunan Renja BKAD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator, kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis dan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah sebagai upaya penyelarasan dan sinergitas pencapaian sasaran serta target yang tertuang dalam Renstra BKAD dan RPJMD tahun yang berkenaan.

Renja BKAD Tahun 2025 merupakan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun, bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan daerah yang merupakan penerjemahan Perencanaan Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan serta Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Rencana Strategis ke dalam

langkah-langkah tahunan yang lebih terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKAD tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi rujukan penyusunan Renja BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950);

2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negerti Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik;

16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua

atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung;

20. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Kabupaten Bandung;

23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

24. Keputusan Bupati Bandung Nomor 008.1.1/KEP.131.BAPPERIDA/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Dokumen Renja BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra 2021-2026 dengan tujuan :

1. Meningkatkan konsistensi, transparansi, dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
4. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKAD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025.
5. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran serta program, kegiata dan sub kegiatan pada BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Pokok bahasan Renja BKAD Kabuten Bandung tahun 2025 menjabarkan rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disusun secara sinergi dan berkesinambungan dengan alokasi pendanaan indikatif kegiatan. Renja juga memuat kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam bentuk program yang berisi rangkaian kegiatan dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Renja BKAD Kabupaten Bandung disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : **PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II : **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III : **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, Serta Program dan Kegiatan

BAB IV : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang rencanan program, kegiatan, sub kegiatan, anggaran dan indikator kinerja

BAB V : **PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun kemungkinan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Rancangan Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 berpedoman pada hasil pencapaian kinerja Badan sampai dengan tahun sebelumnya, serta Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026. Berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah (PD) sampai dengan tahun 2023 Badan Keuangan Aset Daerah memiliki tingkat capaian sebagai berikut :

Tabel 2. 1 T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023
Kabupaten Bandung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Mei 2024	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5.02	**KEUANGAN**									
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan**	**84 Poin**	**80,45 Poin**	**82 Poin**					
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**40%**	**100%**					
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	67%	3 Dokumen	8 Dokumen	53%
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	400%	1 Dokumen	6 Dokumen	120%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Mei 2024	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	400%	1 Dokumen	6 Dokumen	120%
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	9 Laporan	25%
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	7 Laporan	27%1
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100%**	**40%**						
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3960 Orang/Bulan	1584 Orang/Bulan	66 Orang/Bulan	342 Orang/Bulan	518 %	66 Orang/ Bulan	1926 Orang/ Bulan	49%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Mei 2024	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25 %	4 Laporan	9 Laporan	45%
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**100%**	**40%**						
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	40%
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	20 Orang	4 Orang	90 Orang	2250%	4 Orang	110 Orang	220%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Mei 2024	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100%**	**40 %**						
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	71 Paket	40 Paket	1 Paket	4 Paket	400%	1 Paket	44 Paket	62%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	6 Paket	1 Paket	3 Paket	300%	1 Paket	9 Paket	69%
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	60%
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	69 Laporan	28 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	29 Laporan	42%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	30 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	31 Laporan	52%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Mei 2024	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 Unit	3 Unit	-	-	-	-	-	-
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**40%**						
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110 Laporan	44 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	500%	1 Laporan	49 Laporan	45%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	186 Laporan	75 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	12 Laporan	78 Laporan	42%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	484 Laporan	192 Laporan	1 Laporan	8 Laporan	800%	1 Laporan	200 Laporan	41%
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	**98%**	**98%**						
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	134 Unit	50 Unit	25 Unit	18 Unit	72%	25 Unit	68 Unit	51%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Mei 2024	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	260 Unit	104 Unit	17 Unit	13 Unit	76%	17 Unit	117 Unit	45%
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	6 Unit	2 Unit	-	0%	2 Unit	6 Unit	40%
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase Pengelolaan Keuangan Daerah**								
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yang Terangarkan**								
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	-	0%	2 Dokumen	4 Dokumen	40%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	-	0%	2 Dokumen	4 Dokumen	40%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	325 Dokumen	130 Dokumen	65 Dokumen	-	0%	65 Dokumen	130 Dokumen	40%
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	325 Dokumen	130 Dokumen	65 Dokumen	75 Dokumen	115%	65 Dokumen	205 Dokumen	63%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	325 Dokumen	130 Dokumen	65 Dokumen	-	0%	-	130 Dokumen	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Mei 2024	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	325 Dokumen	130 Dokumen	65 Dokumen	-	0%	-	130 Dokumen	40%
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	-	0%	2 Dokumen	4 Dokumen	40%
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	200%	2 Dokumen	8 Dokumen	80%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah**								
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	3 Dokumen	43%
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	3 Dokumen	33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Mei 2024	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	686 Orang	260 Orang	130 Orang	80 Orang	62%	130 Orang	340 Orang	50%
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Daerah**	**Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP**								
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	10 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	50%
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	11 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	5 Dokumen	45%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Mei 2024	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	13 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	6 Dokumen	46%
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	830 Orang	332 Orang	130 Orang	-	0%	130 Orang	332 Orang	40%
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Bantuan Keuangan dan BTT**								
5.02.02.2.04.01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	20 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	-	0%	4 Laporan	8 Laporan	40%
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	-	0%	1 Laporan	2 Laporan	40%
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	-	0%	1 Laporan	2 Laporan	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Mei 2024	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	-	0%	1 Laporan	2 Laporan	40%
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan data dan implementasi SIPD**								
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	830 Orang	322 Orang	130 Orang	-	0%	130 Orang	322 Orang	39%
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik**	**100%**	**40%**	**100%**					
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik**	**100%**	**40%**	**95%**					
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	-	0%	2 Dokumen	4 Dokumen	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Mei 2024	
					Target Renja PD 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	-	0%	1 Laporan	5 Laporan	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan tugas dan pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, keberhasilan capaian kinerja suatu program, kegiatan, sub kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang berdampak pada capaian kinerja pelayanan.

Berikut ini tabel T-C.30 analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung :

Tabel 2. 2 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKAD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD	-	-	80	81	82	83	84	80,15	80,45	82	83	84	
2.	Persentase Aset yang terkelola dengan baik	-	-	93%	93%	93%	93%	93%	85%	99%	98%	98%	93%	
3.	Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang Teranggarkan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	102%	100%	100%	100%	100%	
4.	Tingkat Likuiditas keuangan Pemerintah Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Peresentase PD yang telah menyusun Laporan keuangan sesuai SAP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	99%	95%	95%	95%	

Dari tabel 2. 2 (T-C.30) dapat disimpulkan jika tahun pertama rata-rata capaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja BKAD dapat dicapai dengan baik, dan untuk tahun kedua capaian tujuan, sasaran dari setiap indikator kinerja dapat dicapai sesuai target dan dapat di kategorikan baik.

Pada indikator nilai akuntabilitas kinerja pada tahun pertama periode RPJMD dapat di capai sesuai dengan target dengan realiasi sebesar 80.15 atau melebihi target sebesar 0.15. sedangkan di tahun kedua indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target. Realisasi tahun 2023 memiliki selisih 0,55 dengan target yang ditentukan.

Indikator kedua yaitu Persentase Aset Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik, pada tahun 2022 capaian ini tidak dapat dicapai sesuai dengan target. Pada tahun ini capaian yang dapat diraih yaitu sebesar 85% dan memiliki selisih 8% dengan target yang ditentukan, namun terjadi peningkatan kinerja pada tahun 2023 dimana capaian ini dapat terealisasi sebesar 99% dan melebihi target yang ditentukan sebesar 6%. Capaian kinerja dari indikator ini mengalami peningkatan yang cukup baik.

Indikator sasaran ketiga yaitu Persentase Program dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan pada tahun pertama yaitu 2022 capaian sasaran ini dapat dicapai dengan baik, bahkan melebihi target sebesar 2% diatas target. Hal ini dikarenakan adanya penambahan 3 program pada RAPBD. Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD indikator ini meraih capaian sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan jika kinerja dalam pencapaian indikator Persentase Program dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan dapat diraih dengan baik.

Indikator sasaran keempat mengenai tingkat likuiditas pengelolaan keuangan, dapat terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari Tingkat Likuiditas Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun pertama dan kedua periode RPJMD dapat diraih sesuai dengan target dan dicapai dengan maksimal dengan tingkat capaian 100%.

Indikator sasaran untuk Persentase PD yang telah Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP dalam dua tahun terakhir dicapai dengan maksimal. Pencapaian ini ditandai dengan seluruh Perangkat Daerah sudah menyusun

laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut capaian pada indikator ini tercapai dengan baik yaitu 100% dalam dua tahun awal pada periode RPJMD.

Indikator keenam yang mengampu program pengelolaan barang milik daerah memiliki indikator sasaran yaitu Persentase PD yang telah mengelola BMD dengan baik. Capaian indikator ini pada tahun 2022 yaitu sebesar 95% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 99%, terjadi penigkatan sebesar 4%. Peningkatan ini juga menunjukan tren yang baik dalam urusan pengelolaan barang milik daerah yang menunjukan semakin tertibnya Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana telah dikemukakan di Renstra bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menghadapi beberapa isu strategis yang yang harus di antisipasi dan dikelola. Isu- isu strategis tersebut dapat menjadi hambatan maupun peluang bagi BKAD dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan dan berpengaruh secara langsung terhadap tugas pokok dan funsi (tupoksi) BKAD. Identifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat di identifikasikan dari permasalahan-permasalahan yang dapat diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3 Isu Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Jumlah sumber daya aparatur belum sesuai dengan kebutuhan	Masih terdapat beberapa kekosongan jabatan	Rekrutmen pegawai belum sepenuhnya sesuai usulan kebutuhan
2	Masih adanya kendala dalam pengoperasian aplikasi yang menunjang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;	Tidak terakomodirnya kebutuhan tahapan yang berlaku sesuai aturan	Belum lengkapnya fitur-fitur pada aplikasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
3	Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.	Masih terjadinya kesalahan dalam penganggaran, penatausahaan dan peLaporan keuangan dan barang milik daerah	Minimnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	perubahan regulasi yang cepat dan dinamis

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2. 4 T-C.31.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bandung	**Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan**	**83**	**24.209.886.986**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kab. Bandung	**Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan**	**83**	**30.411.613.942,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**260.550.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**260.550.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	12.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	12.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Dokumen	85.550.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Dokumen	85.550.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Realisasi Kinerja SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	73.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	73.000.000,00	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100%**	**15.950.059.986**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100%**	**22.151.786.942,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	15.780.259.986	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	21.981.986.942,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	69.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	69.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	100.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	100.600.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bandung	**Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100%**	**12.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100%**	**12.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	12.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	12.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bandung	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**100%**	**1.086.593.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**100%**	**1.086.593.000,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	300.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	300.000.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	40.593.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	40.593.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	146.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	146.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	210 Orang	400.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	210 Orang	400.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Perundang Undangan					Perundang Undangan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105 Orang	200.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105 Orang	200.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandung	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100%**	**2.704.926.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100%**	**2.704.926.000,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.492.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.492.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.254.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.254.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	97.611.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	97.611.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	15.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	101.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	101.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	319.561.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	319.561.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	250.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	250.000.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 Dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1 Dokumen	200.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Elektronik pada SKPD			Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	**Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**9.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Bandung	**Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**9.000.000,00**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	9.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	9.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	**Persentae Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2.789.260.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bandung	**Persentae Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2.789.260.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22 Laporan	89.260.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22 Laporan	89.260.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	600.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			dan Listrik yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	98 Laporan	2.100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	98 Laporan	2.100.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**98%**	**1.397.498.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**98%**	**1.397.498.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 unit	77.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 unit	77.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	77.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	77.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	1.243.498.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	1.243.498.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kantor dan Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi			dan Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi			
Jumlah 1					**24.209.886.986,00**	**Jumlah 1**				**30.411.613.942,00**	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Bandung	**Presentase Pengelolaan Keuangan daerah**	**100%**	**935.431.847.402**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Kab. Bandung	**Presentase Pengelolaan Keuangan daerah**	**100%**	**946.468.162.056,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bandung	**Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yang Terangarkan**	**100%**	**2.064.675.000**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yang Terangarkan**	**100%**	**2.064.675.000,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	135.985.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	135.985.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	97.815.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	97.815.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	214.500.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	214.500.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	80.750.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	80.750.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	114.500.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	114.500.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	52.093.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	52.093.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Bandung	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	437.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Bandung	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	437.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Bandung	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	371.406.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Bandung	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	371.406.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	560.426.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	560.426.000,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Bandung	**Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah**	**100%**	**466.065.000**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Kab. Bandung	**Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah**	**100%**	**466.065.000,00**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	66.546.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	66.546.000,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen	65.252.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen	65.252.000,00	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	130 Orang	334.267.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	130 Orang	334.267.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Daerah	Kab. Bandung	**Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP**	**100%**	**703.584.000**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PeLaporan**	Kab. Bandung	**Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP**	**100%**	**703.584.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Keuangan Daerah					
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	78.810.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	78.810.000,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	184.566.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	184.566.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Kab. Bandung	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen	129.688.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab	2 Dokumen	129.688.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	113.215.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	113.215.000,00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	240 Orang	197.305.000	Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	240 Orang	197.305.000,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Bandung	**Persentase Bantuan Keuangan dan BTT**	**100%**	**932.144.485.402**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase Bantuan Keuangan dan BTT**	**100%**	**943.180.800.056,00**	
	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan	1 Dokumen	-	Pengelolaan Dana Cadangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pemerintah Daerah			Pemerintah Daerah		Dana Cadangan Pemerintah Daerah			
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	4 Laporan	80.000.000	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	4 Laporan	80.000.000,00	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	685.678.596.100	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	751.787.786.112,00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	100.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	60.000.000.000,00	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	146.385.889.302	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	131.313.013.944,00	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Bandung	**Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD**	100 Orang	**53.038.000**	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Kab. Bandung	**Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD**	100 Orang	**53.038.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	53.038.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	53.038.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Bandung	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik**	**95,00%**	**1.487.944.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Kab. Bandung	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik**	**95,00%**	**1.487.944.000,00**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik**	**95,00**	**1.487.944.000**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik**	**95,00%**	**1.487.944.000,00**	
	Penyusunan Standar Harga	Kab. Bandung	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	281.620.000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Bandung	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	281.620.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	130.820.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	130.820.000,00	
	Penyusunan Kebijakan	Kab. Bandung	Jumlah Kebijakan Pengelolaan	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan	Kab. Bandung	Jumlah Kebijakan Pengelolaan	1 Dokumen	1.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Barang Milik Daerah			Barang Milik Daerah		Barang Milik Daerah			
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.000.000,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	253.252.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	253.252.000,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	305.252.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	305.252.000,00	
Jumlah 2					**936.919.791.402**	**Jumlah 2**				**947.956.106.056,00**	
Jumlah Total					**961.129.678.388**	**Jumlah Total**				**978.367.719.998,00**	

Pada tabel 2.4 T-C 31 Review Terhadap Rancangn Awal RKDP tahun 2025 Kabupaten Bandung terdapat beberapa perbedaan pagu total anggaran antara Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Akhir RKPD pada tahun anggaran 2025. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat kondisi yang berubah sesuai pagu belanja yang belum di anggarkan pada Rancangan Awal RKPD serta melakukan beberapa penyesuain pada dokumen Renja Akhir.

2.5 Penelaahan Usulan Program

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung ditelaah bahwa Program dan Kegiatan terakomodir secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumusan kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 20205 hasil Review Rancangan Akhir RKPD pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 5 T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung

NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kab.Bandung	**Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan**	**83 Poin**	
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab.Bandung	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	100 %	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	

NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	
10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	
11	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	
12	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab.Bandung	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100%**	
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	

NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	
16	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab.Bandung	**Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100%**	
17	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	
18	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab.Bandung	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**100%**	
19	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	
20	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	
21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	
22	Sosialisasi Peraturan	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti	210 Orang	

NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
	PerundangUndangan		Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan		
23	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105 Orang	
24	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab.Bandung	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100%**	
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	
27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
29	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	
31	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	
32	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	

NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
33	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	
34	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	
35	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab.Bandung	**Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	
36	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	
37	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab.Bandung	**Persentae Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	
38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22 Laporan	
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
40	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	98 Laporan	
41	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Kab.Bandung	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**98%**	

NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
	Pemerintahan Daerah				
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 unit	
43	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	
45	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Kab.Bandung	**Presentase Pengelolaan Keuangan daerah**	**100%**	
46	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Kab.Bandung	**Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yang Terangarkan**	**100%**	
47	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	
48	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	
49	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	
50	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	
51	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	
52	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab.Bandung	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	

NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
53	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab.Bandung	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	
54	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab.Bandung	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	
55	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	
56	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Kab.Bandung	**Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah**	**100%**	
57	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	
58	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen	
59	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	130 Orang	
60	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Daerah**	Kab.Bandung	**Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP**	**100%**	
61	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	1 Dokumen	

NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
	Pendapatan-LO dan Beban		Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		
62	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	
63	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab.Bandung	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	
64	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	
65	Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	240 Orang	
66	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Kab.Bandung	**Persentase Bantuan Keuangan dan BTT**	**100%**	
67	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	
68	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Analisis	4 Laporan	

NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
			Investasi Pemerintah Daerah		
69	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	
70	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	
71	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	
72	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Kab.Bandung	**Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD**	100 Orang	
73	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kab.Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	
74	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Kab.Bandung	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik**	**95,00%**	
76	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Kab.Bandung	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik**	**95,00%**	
77	Penyusunan Standar Harga	Kab.Bandung	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	
78	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	

NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
79	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	
80	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	
81	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	
82	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab.Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam BAB ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pasal 159 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penelaahan terhadap Dokumen perencanaan pembangunan Nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomi oleh daerah. Mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Penelaahan isu strategis nasional juga perlu diperhatikan dalam menyusun isu strategis daerah. Pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Belandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawa Cita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka piker. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi Prioritas Nasional (PN) bagi pembangunan tahunan Nasional.

Telaah isu strategis yang ada pada RPJMD Provinsi Jawa Barat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan RPJMD Kabupaten

Bandung. Isu Strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah sebagi berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing SDM;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan Pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;
5. Reformasi birokrasi.

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berlaku yakni tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari RPJPD 2005-2025. Tema pada tahapan ini adalah tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat jawa barat. Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka disusun lima misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban;
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui PeningkatanPelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat - Pusat Inovasi serta Pelaku Pembanguna;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratifantara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan Tema atau fokus pembangunan Jawa Barat secara keseluruhan adalah :

2019 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
2020 : Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik Melalui Percepatan Penanganan;

2021 : Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem;
2022 : Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian;
2023 : Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat.

Kabupaten Bandung sebagai bagian dari PKN (Pusat Kegiatan Nasional), dengan kegiatan utama industri nonpolutif, dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, agroindustri, wisata alam, tanaman pangan dan hortikultura, dan perkebunan. Arahan pengembangan PKL pada WP Cekungan Bandung yaitu Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Pangalengan. Selain itu, Kabupaten Bandung termasuk pada Rencana Proyek Strategis Provinsi Tahun 2018-2023 yakni menjadi Kawasan Sains dan Teknologi Kopi Jawa Barat di Pangalengan.

Isu strategis Kabupaten Bandung meliputi enam kelompok besar isu yang didalamnya mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan lingkungan hidup, ekonomi wilayah, tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur wilayah, dan kebencanaan. Seluruh isu-isu ini tergabung menjadi isu strategis dibawah ini yaitu :

1. Isu Strategis 1 : Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiiliki kemampuan untuk berdaya Saing;
2. Isu Strategis 2 : Belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan;
3. Isu Strategis 3 : Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing;
4. Isu Strategis 4 : Belum tertatanya ekosistem ketahanan pangan;
5. Isu Strategis 5 : Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah;
6. Isu Strategis 6 : Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan penelaahan terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan Visi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijkan lima tahun mendatang. Visi Kabupaten Bandung adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG BEDAS (BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA)”

Kemudian visi tersebut dijabarkan kedalam misi-misi yang ada pada Kabupaten Bandung. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, dalam hal ini berperan dalam pencapaian Misi Ke-4 (Empat) yaitu :

“MENGOPTIMALKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI BIROKRASI YANG PROFESIONAL, DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN”

Setelah Penjabaran Visi dan Misi yang ada pada Kabupaten Bandung, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tujuan yaitu :

“MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DAN TERCAPAINYA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH”

Untuk Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan BKAD;
2. Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
3. Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berikut secara detail tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran BKAD

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
1	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan BKAD**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Akip dan Presentase pelayanan kesekretariatan**		
	Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran evaluasi PD tepat waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran an evaluasi PD tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	
	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Telaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Meningkatnya kualitas Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Meningkatnya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
	Meningkatnya Pelaksanaan Pengumpulan Data	Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan Data	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Statistik Sektoral Daerah	Statistik Sektoral Daerah				
	Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan tepat waktu	Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	
	Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terlaksanannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daera pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terselenggaranya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	Meningkatnya Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Tersusunya Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	
	Meningkatnya Jumlah Paket Pakaian Dinas	Terselenggaranya Jumlah Paket Pakaian Dinas	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	beserta Atribut Kelengkapan	beserta Atribut Kelengkapan				
	Meningkatnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksanannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Meningkatnya Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Terselenggaranya Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
	Meningkatnya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Meningkatnya Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	
	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	Meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Meningkatnya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Meningkatnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Meningkatnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Meningkatnya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Meningkatnya Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terseleggaranya Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terselenggaranya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
	Meningkatnya penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Laporan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tepenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Meningkatnya Pemeliharaan BMD dalam Kondisi Baik	Terlaksanannya Pemeliharaan BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase BMD dalam Kondisi Baik	
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Telaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Meningkatnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2	**Meningkatnya optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah**	**Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase Pengelolaan Keuangan Daerah**		
	Meningkatnya Persentase Program dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan	Meningkatnya Persentase Program dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Program dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
	Meningkatnya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Terselenggaranya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
	Meningkatnya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Terselenggaranya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD			Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi
	Meningkatnya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Terselenggaranya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi
	Meningkatnya Koordinasi, Penyusunan dan	Terselenggaranya Koordinasi, Penyusunan dan	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD			Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Verifikasi Perubahan DPA SKPD				
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Tercapainya Tingkat Likuiditas Keuangan Daerah	Terpenuhinya Tingkat Likuiditas Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah	
	Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	Meningkatnya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
	Meningkatnya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya persentase PD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Meningkatnya persentase PD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP	

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Meningkatnya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
	Meningkatnya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
	Meningkatnya Presentase Bantuan Keuangan dan BTT	Tercapainya Presentase Bantuan Keuangan dan BTT	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Presentase Bantuan Keuangan dan BTT	

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Meningkatnya Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daera			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Dokumen Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daera	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Meningkatnya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perrencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah
	Meningkatnya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
	Meningkatnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
	Meningkatnya hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersusunnya hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	Meningkatnya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksanakanya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
	Meningkatnya Pengelolaan Dana Bagi Hasil	Tersalurkannya Pengelolaan Dana Bagi Hasil	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Teselenggaranya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan data dan implementasi SIPD	
	Meningkatnya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	**Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola**		

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
				BMD dengan Baik		
	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah Yang telah mengelola BMD dengan baik	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah Yang telah mengelola BMD dengan baik	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik	
	Meningkatnya Penyusunan Standar Harga	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga			Jumlah Standar Harga yang Disusun
	Meningkatnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
	Meningkatnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Meningkatnya Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik
	Meningkatnya Penilaian Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
						Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
	Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	Meningkatnya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sehingga baik tujuan maupun sasaran yang direncakan dan telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan, tujuan, sasaran, visi dan misi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisna, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi Bupati. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi.

Pada tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung melaksanakan 3 (Tiga) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 65 (Enam Puluh Lima) Sub Kegiatan. Rumusan program dan Kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 T-C 32. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**				**978.367.719.998,00**				
5.02	**Keuangan**				**978.367.719.998,00**				
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan**	**Kab. Bandung**	**83**	**30.411.613.942,00**			**84**	**24.209.886.986**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**Kab. Bandung**	**100%**	**260.550.000,00**			**100%**	**260.550.000,00**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	3 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	50.000.000,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	12.500.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	12.500.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.500.000,00
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	12.500.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.500.000,00
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	12.500.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.500.000,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	4 Dokumen	85.550.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	85.550.000,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	3 Dokumen	73.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	73.000.000,00
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	Kab. Bandung	1 Dokumen	1.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Statistik Sektoral Daerah	Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung	1 Data	1.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Data	1.000.000,00
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**Kab. Bandung**	**100%**	**22.151.786.942,00**			**100%**	**15.950.059.986**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	72 Orang/ bulan	21.981.986.942,00	PAD,Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja		72 Orang/ bulan	15.780.259.986
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	69.200.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Laporan	69.200.000,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Kab. Bandung	4 Laporan	100.600.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		4 Laporan	100.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Kab. Bandung**	**100%**	**12.000.000,00**			**100%**	**12.000.000,00**
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bandung	2 Dokumen	12.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	12.000.000,00
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**Kab. Bandung**	**100%**	**1.086.593.000,00**			**100%**	**1.086.593.000,00**
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung	1 Paket	300.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Paket	300.000.000,00
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bandung	1 Dokumen	40.593.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	40.593.000,00
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Kab. Bandung	10 orang	146.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		10 orang	146.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pendidikan dan Pelatihan							
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Kab. Bandung	210 Orang	400.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		210 Orang	400.000.000,00
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	105 Orang	200.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		105 Orang	200.000.000,00
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**Kab. Bandung**	**100%**	**2.704.926.000,00**			**100%**	**2.704.926.000,00**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	75.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Paket	75.000.000,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	15 Paket	1.492.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		15 Paket	1.492.000.000,00
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Paket	100.000.000,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	54.254.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Paket	54.254.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 Paket	97.611.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		2 Paket	97.611.000,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	3 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	15.000.000,00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	12 Laporan	101.500.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		12 Laporan	101.500.000,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	12 Laporan	319.561.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		12 Laporan	319.561.000,00
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	250.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	250.000.000,00
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bandung	1 Dokumen	200.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	200.000.000,00
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bandung**	**100%**	**9.000.000,00**			**100%**	**9.000.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	9.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Unit	9.000.000,00
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentae Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bandung**	**100%**	**2.789.260.000,00**			**100%**	**2.789.260.000,00**
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung	22 Laporan	89.260.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		22 Laporan	89.260.000,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	600.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		12 Laporan	600.000.000,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	98 Laporan	2.100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		98 Laporan	2.100.000.000,00
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	Kab. Bandung	**98%**	**1.397.498.000,00**			**98%**	**1.397.498.000,00**
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Bandung	29 unit	77.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		29 unit	77.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung	52 Unit	77.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		52 Unit	77.000.000,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bandung	3 Unit	1.243.498.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		3 Unit	1.243.498.000,00
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase Pengelolaan Keuangan daerah**	**Kab. Bandung**	**100%**	**946.468.162.056,00**			**100%**	**917.031.847.402,60**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yang Terangarkan**	**Kab. Bandung**	**100%**	**2.064.675.000,00**			**100%**	**2.064.675.000,00**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Bandung	2 Dokumen	135.985.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	135.985.000,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Bandung	2 Dokumen	97.815.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	97.815.000,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Bandung	65 Dokumen	214.500.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		65 SKPD	214.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Bandung	65 Dokumen	80.750.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		65 SKPD	80.750.000,00
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Bandung	65 Dokumen	114.500.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		65 SKPD	114.500.000,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Bandung	65 Dokumen	52.093.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		65 SKPD	52.093.000,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Bandung	2 Dokumen	437.200.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	437.200.000,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Bandung	2 Dokumen	371.406.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	371.406.000,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Bandung	1 Dokumen	560.426.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	560.426.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kebijakan Bidang Anggaran								
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah**	**Kab. Bandung**	**100%**	**466.065.000,00**			**100%**	**466.065.000,00**
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bandung	2 Dokumen	66.546.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	66.546.000,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bandung	3 Dokumen	65.252.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	65.252.000,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	130 Orang	334.267.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		130 Orang	334.267.000,00
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Daerah**	**Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP**	**Kab. Bandung**	**100%**	**703.584.000,00**			**100%**	**703.584.000,00**
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Kab. Bandung	1 Dokumen	78.810.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	78.810.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban							
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Bandung	2 Laporan	184.566.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		2 Laporan	184.566.000,00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	2 Dokumen	129.688.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	129.688.000,00
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	2 Dokumen	113.215.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	113.215.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	240 Orang	197.305.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		166 Orang	197.305.000,00
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Bantuan Keuangan dan BTT**	**Kab. Bandung**	**100%**	**943.180.800.056,00**			**100%**	**913.744.485.402,00**
5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	-
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	4 Laporan	80.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		4 Laporan	80.000.000,00
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bandung	1 Laporan	751.787.786.112,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa		1 Laporan	665.678.596.100,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bandung	1 Laporan	60.000.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	100.000.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	1 Laporan	131.313.013.944,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Trasnsfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	147.985.889.302,00
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD**	**Kab. Bandung**	100 Orang	**53.038.000,00**			166 Orang	**53.038.000,00**
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	100 Orang	53.038.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		166 Orang	53.038.000,00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik**	**Kab. Bandung**	**95,00%**	**1.487.944.000,00**			**95%**	**1.487.944.000,00**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik**	**Kab. Bandung**	**95,00**	**1.487.944.000,00**			**95%**	**1.487.944.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Bandung	1 Dokumen	281.620.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	281.620.000,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	2 Dokumen	130.820.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	130.820.000,00
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	1 Dokumen	1.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.000.000,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	1 Laporan	1.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.000.000,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	1 Laporan	253.252.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Laporan	253.252.000,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	1 Dokumen	305.252.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Laporan	305.252.000,00
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan	Kab. Bandung	2 Laporan	515.000.000,00	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	515.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Laporan Barang Milik Daerah							

BAB IV
RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung pencapaian sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Bupati maupun penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung .

Rencana Kerja berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BKAD tahun anggaran 2025 Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Unit Penanggung Jawab	Target Capaian Kinerja (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**978.367.719.998,00**
5.02	**KEUANGAN**				**978.367.719.998,00**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan**		**83**	**30.411.613.942,00**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**		**100%**	**260.550.000,00**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	50.000.000,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	12.500.000,00
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	12.500.000,00
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	12.500.000,00
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	12.500.000,00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Unit Penanggung Jawab	Target Capaian Kinerja (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Dokumen	85.550.000,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen	73.000.000,00
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	1.000.000,00
5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	1.000.000,00
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**		**100%**	**22.151.786.942,00**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		72 Orang/bulan	21.981.986.942,00
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	69.200.000,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	100.600.000,00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Unit Penanggung Jawab	Target Capaian Kinerja (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**100%**	**12.000.000,00**
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	12.000.000,00
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**		**100%**	**1.086.593.000,00**
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	300.000.000,00
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	40.593.000,00
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 orang	146.000.000,00
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan		210 Orang	400.000.000,00
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		105 Orang	200.000.000,00
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**		**100%**	**2.704.926.000,00**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	75.000.000,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15 Paket	1.492.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Unit Penanggung Jawab	Target Capaian Kinerja (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	100.000.000,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	54.254.000,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	97.611.000,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	15.000.000,00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	101.500.000,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	319.561.000,00
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	250.000.000,00
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	200.000.000,00
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**9.000.000,00**
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	9.000.000,00
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentae Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**2.789.260.000,00**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Unit Penanggung Jawab	Target Capaian Kinerja (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		22 Laporan	89.260.000,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	600.000.000,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		98 Laporan	2.100.000.000,00
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**		**98%**	**1.397.498.000,00**
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		29 unit	77.000.000,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		52 Unit	77.000.000,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	1.243.498.000,00
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase Pengelolaan Keuangan daerah**		**100%**	**946.468.162.056,00**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yang Terangarkan**		**100%**	**2.064.675.000,00**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	135.985.000,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	97.815.000,00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Unit Penanggung Jawab	Target Capaian Kinerja (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		65 Dokumen	214.500.000,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		65 Dokumen	80.750.000,00
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		65 Dokumen	114.500.000,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		65 Dokumen	52.093.000,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 Dokumen	437.200.000,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2 Dokumen	371.406.000,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		1 Dokumen	560.426.000,00
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah**		**100%**	466.065.000,00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		2 Dokumen	66.546.000,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		3 Dokumen	65.252.000,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		130 Orang	334.267.000,00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Unit Penanggung Jawab	Target Capaian Kinerja (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Daerah**	**Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP**		**100%**	703.584.000,00
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		1 Dokumen	78.810.000,00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		2 Laporan	184.566.000,00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		2 Dokumen	129.688.000,00
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Pemerintah Daerah		2 Dokumen	113.215.000,00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		240 Orang	197.305.000,00
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Bantuan Keuangan dan BTT**		**100%**	**943.180.800.056,00**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Unit Penanggung Jawab	Target Capaian Kinerja (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah		1 Dokumen	-
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah		4 Laporan	80.000.000,00
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		1 Laporan	751.787.786.112,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1 Laporan	60.000.000.000,00
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		1 Laporan	131.313.013.944,00
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD**		100 Orang	**53.038.000,00**
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		100 Orang	53.038.000,00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik**		**95,00%**	**1.487.944.000,00**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik**		**95,00%**	**1.487.944.000,00**
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		1 Dokumen	281.620.000,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	130.820.000,00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
			Unit Penanggung Jawab	Target Capaian Kinerja (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	1.000.000,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		1 Laporan	1.000.000,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		1 Laporan	253.252.000,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	305.252.000,00
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		2 Laporan	515.000.000,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja BKAD Kabupaten Bandung merupakan bentuk rencana yang akan dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan dari serangkaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKAD Kabupaten Bandung tahun 2025.

Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) BKAD yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung, diharapkan tingkat keberhasilan dari Rencana Kerja tahun 2025 ini akan berkonstribusi ketercapaian serta kesinambungan pelaksanaan Kinerja Bupati beserta perangkat Daerahnya pada tahun 2025.

Rencana Kerja BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025 menjadi pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BKAD Kabupaten Bandung. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja BKAD Kabupaten Bandung sangat tergantung dari komitmen, kesepakatan, kesepahaman seluruh unsur BKAD Kabupaten Bandung.

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ttd

ERWAN KUSUMA HERMAWAN

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA